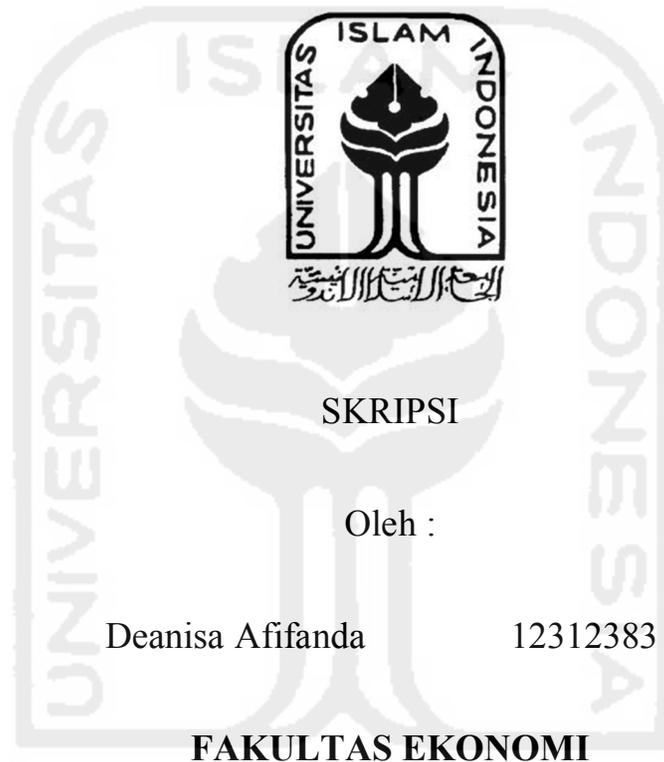


**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Oleh :

Deanisa Afifanda

12312383

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Deanisa Afifanda 12312383

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 25 Januari 2017

Penulis .



**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI
KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
JAWA TENGAH**



Dosen Pembimbing,

(Johan Arifin SE, M.Si, Ph.D)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DIY DAN JATENG

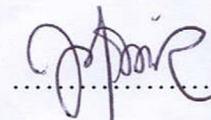
Disusun Oleh : **DEANISA AFIFANDA**

Nomor Mahasiswa : **12312383**

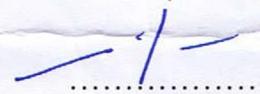
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 20 Februari 2017

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D.



Penguji : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

Halaman Motto

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

(HR. Dailani dari Anas r.a)

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil' alamin.

Penelitian berjudul "*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah*" disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang mencintai hamba-Nya dengan senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta menjawab setiap doa hamba-Nya dalam menjalani keseharian sebagai seorang muslim

yang berjuang menuntut ilmu di jalan-Nya. Penulis sangat bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan, Ya Rabb.

2. Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah yang selalu merindukan ummatnya, suri tauladan bagi seluruh khalifah di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, pelajar dan calon pemimpin di masa mendatang.
3. Bapak Suryanto S.Pd.,MM dan Ibu Dra Herry Widayati yang sudah rela menjadi relawan kehidupan penulis dari kelahiran , masa kecil, masa pertumbuhan dan hingga saat ini dan pastinya terus menerus menjadi penyemangat kehidupan penulis. Terima kasih sudah menjadi tempat penulis mencurahkan seluruh keluh kesah, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan yang ternyata tidak semudah dan seenak seperti dalam sinetron maupun didalam film yang biasa penulis tonton, dan selalu mengingatkan bahwa hidup ini banyak rintangan dan cobaan serta untuk mencari keridhaan Allah SWT semata. Semoga keluarga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam ridho-Nya.
4. Ade Panggiring dan Aldhebaran F. Kafka selaku suami dan anak penulis yang selalu tak henti-hentinya memberikan support kepada penulis dengan penuh kesabaran dan kasihsayang.
5. Nadya Bella Amira, Rizaldi Naufal Herdanto, Salmalita Ferasa selaku adik kandung penulis. Terimakasih sudah selalu menjadi saudara yang

menyenangkan bagi penulis, semoga bisa selalu akur dan saling memberikan support hingga waktu yang tidak dapat dipastikan.

6. Bapak Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Salah satu guru yang mengajarkan penulis tentang menjadi seorang pribadi yang sabar dan berkarakter sehingga dapat menjadi pribadi yang dapat bersaing nantinya, terima kasih sudah membimbing penulis dalam dunia perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada bapak beserta keluarga.
7. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi atas segala ilmu yang penulis peroleh.
8. Fitria Amelyani, Rizky Oktavanila, Maharani Triputriadi (CANTIK) selaku sahabat dari awal kuliah hingga saat ini semoga persahabatan ini langgeng sampai waktu yang tidak dapat diprediksikan. Terimakasih selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis serta memberikan warna kehidupan selama masa kuliah.

9. Abel Sambodo dan M. Faldi Bastian selaku sahabat penulis yang hampir setiap hari menemani kemanapun penulis pergi selama di jogja. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat berkesan bagi penulis.

Wassalamualaikum wr.wb

Penulis,

(Deanisa Afifanda)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	7
2.2. Hipotesis Penelitian	19
2.3. Kerangka pemikiran.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Populasi dan Sampel Penelitian	25
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	26
3.3.	Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian	27
3.4.	Metode Analisis Data.....	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Analisis Statistik Deskriptif	34
4.2.	Uji Asumsi Klasik	36
4.3.	Analisis Regresi Berganda	40
4.5.	Pembahasan.....	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	50
5.2.	Keterbatasan Penelitian	51
5.3.	Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
----------------------	----

Lampiran	57
----------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1. Observasi Penelitian	26
4.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	34
4.2. Output Uji Normalitas.....	37
4.3. Output Uji Multikolinieritas	38
4.5. Output Uji Autokorelasi	40
4.6. Output Regresi Linier Berganda.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1. Kerangka Pemikiran	24
4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Sampel Penelitian	57
2. Data Penelitian.....	59
3. Data Hasil Olah Data	69



ABSTRAK

Perubahan perkembangan tata kelola pemerintah daerah ditandai dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang bertujuan agar setiap daerah dapat mandiri dalam melakukan pembangunan daerahnya dalam bentuk belanja modal yang berguna untuk menambah aset tetap daerah. Sampel penelitian ini menggunakan 40 kota/kabupaten yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam membuat kebijakan publik terutama berkaitan dengan belanja modal

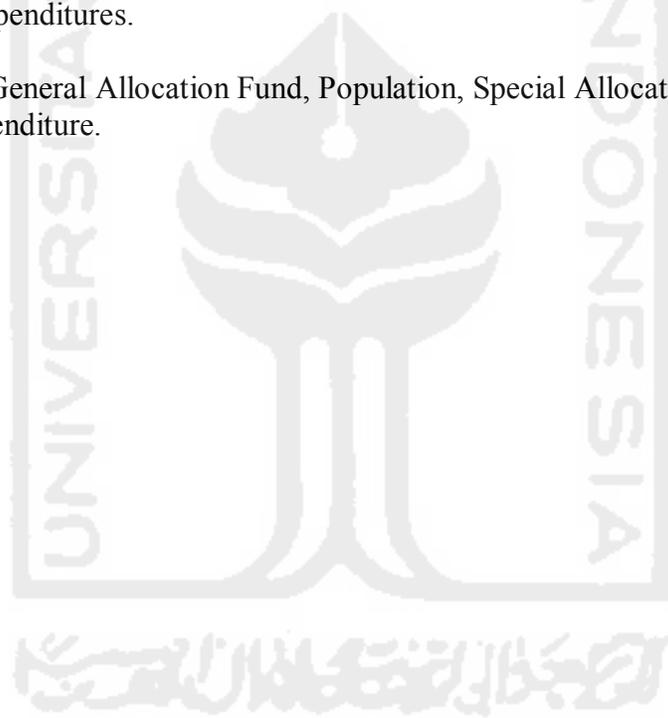
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.



ABSTRACT

Changes in the development of local governance is characterized by the presence of local autonomy and fiscal decentralization, which have purpose to make every region becomes independent in conducting their regional development in the form of capital expenditure that is useful to increase the fixed assets of region. Sample of the research is using the 40 cities/districts in the province of Special Region Yogyakarta and Central Java. Regression analysis results show that the General Allocation Fund and Special Allocation Fund have significant positive effect on capital spending, while the variable of Total Population has no significant effect on capital expenditure. Thus the local government is expected to consider the General Allocation Fund and Special Allocation Fund in making public policy mainly related to capital expenditures.

Keywords: General Allocation Fund, Population, Special Allocation Fund, and Capital Expenditure.



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Perkembangan tata kelola pembangunan daerah dalam sepuluh tahun terakhir di Indonesia telah ditandai dengan perubahan mendasar pada dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek ekonomi. Pada aspek politik tercermin pada semakin kuatnya kewenangan daerah dalam menentukan berbagai kebijakan di daerah, sedangkan dimensi ekonomi ditandai dengan adanya kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang semakin besar. Dua hal tersebut merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada dasarnya bertujuan untuk memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*), mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*), dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik.

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, serta keinginan masyarakat di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan pendapatan yang mereka terima dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Desentralisasi juga merupakan pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban yang diikuti dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (*public service*). Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan pemerintah daerah (*local government financial management*) dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah (Sriyana, 2011).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2007). Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk

belanja rutin. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, baik dari dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah sendiri, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat.

Sumber pembiayaan yang penting bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD dalam jumlah yang besar diharapkan dapat mendorong akuntabilitas, memperbaiki pembiayaan daerah, dan juga dapat memperkecil sumber pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang secara langsung meningkatkan kemandirian daerah. Potensi keuangan daerah yang tidak sama antar daerah menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Untuk mengurangi kesenjangan dan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan, lahirah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.

Menurut data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015, DAU merupakan bagian terbesar dari dana perimbangan, yaitu sekitar 3,42% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Proporsi dana perimbangan semakin lama semakin menurun dalam anggaran pemerintah daerah sejalan dengan peningkatan penerimaan PAD walaupun masih menjadi sumber utama

pendapatan daerah. Pada tahun 2007 persentase dana perimbangan adalah 78% dari total pendapatan daerah sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 73% (DJPK-Kemenkeu, 2011). Dana Alokasi Umum masih tetap menjadi salah satu bagian terbesar anggaran nasional dan juga merupakan sumber utama anggaran Pemerintah daerah. Pendapatan kabupaten/kota sekitar 80% adalah dari Dana Alokasi Umum dan untuk provinsi sekitar 30%.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang meneliti mengenai pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada $\alpha = 1\%$. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menambah variabel independen lain yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jumlah Penduduk (JP).

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian pemerintah kabupaten kota di Jawa tengah dan DIY. Hal yang menjadi pertimbangan penulis memilih Provinsi DIY dan Jawa Tengah sebagai obyek penelitian adalah adanya peningkatan belanja modal di Provinsi DIY dan Jawa Tengah selama lima tahun terakhir (DJPK, 2015). Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah DIY memiliki kegiatan pembangunan dan perekonomian di daerah yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Kota di DIY dan Jawa Tengah”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah DAU berpengaruh terhadap belanja modal ?
- b. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja modal ?
- c. Apakah DAK berpengaruh terhadap belanja modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh DAU, Jumlah Penduduk dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis khususnya di bidang pengalokasian belanja modal di tiap-tiap Provinsi di Indonesia. dan Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah provinsi terkait pemanfaatan DAU dan DAK terhadap pengalokasian belanja modal.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menguraikan metode penelitian yang berisi tentang, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel-variabel penelitian, dan analisis data.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan data khusus yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang telah ditentukan berdasarkan alat dan langkah analisis sehingga akan membawa ke tujuan dan sasaran penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang akan membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari landasan teori penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran teoritis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah, mengkaji tindakan sebelumnya dan mengetahui program pemerintah di masa yang akan datang. Anggaran daerah mengetahui posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

Beberapa pengertian APBD menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Bastian (2002) mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja Pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik

2. Nordiawan, et.al (2007), APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Mardiasmo (2005), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

2.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik

Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002).

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006)

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah (Ardhini, 2011).

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan(Ardhini, 2011).

Belanja modal jenis Pelayanan Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan. Belanja modal untuk pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Ardhini, 2011).

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) mengenai pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan

Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal. Data sampel terdiri dari 292 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada $\alpha = 1\%$. Ini mengindikasikan bahwa DAU yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti untuk gaji pegawai. Sedangkan PAD walaupun kecil dalam proporsi penerimaan namun sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian Wandira (2013) yang meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah (2012) yang bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 21 kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 105. Data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Data tersebut bersumber dari DJKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ardhini (2011) meneliti dengan tujuan untuk menguji apakah rasio keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik dengan perangkat SPSS (Statistical Package for the Social) 17.00. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan dengan Rasio Gini.

Adiwiyana (2011) yang meneliti mengenai Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal Penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki efek pada belanja Modal. Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja Modal yang didasarkan pada PAD dan DAU. Sedangkan pertumbuhan ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh pada belanja Modal.

2.1.4 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, terdapat prinsip *money follow function* yang merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip ini arti bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan akan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yaitu (Barzelay,(1991) dalam Hadi(2009)):

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdapat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan melalui pemungutan pajak (*taxing powering*) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan

asumsi dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat daerahnya sehingga dapat terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan negara (Hadi, 2009).

2.1.5 Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2002).

Menurut Halim (2002) ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk

menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Halim, 2002). Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2002):

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

2.1.6 Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik(2014), mendefinisikan bahwa yang termasuk penduduk suatu wilayah adalah ketika dilakukan pencacahan memiliki karakteristik : tinggal diwilayah itu secara menetap atau sudah enam bulan atau lebih; tinggal di wilayah kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap; sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari enam bulan dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan; serta mereka yang yang bertempat tinggal di wilayah itu dengan mengontrak/kos/sewa untuk bekerja atau sekolah yang kemungkinan pindah lagi karena berbagai alasan (Badan Pusat Statistik, 2014). Simanjuntak (2012) menyatakan penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Pengertian penduduk pada penelitian ini memakai konsep Badan Pusat Statistik. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan orang.

2.1.7 Dana Alokasi Khusus.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi-tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah incrementalism. Sistem penganggaran Incrementalism adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan. *Incremental Budgeting* merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama adalah metode kenaikan/penurunan (*incremental*) dari angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya. Penyusunan anggaran yang bersifat inkremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran pada tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau

jumlah penduduk (Bastian, 2002). Salah satunya adalah penentuan DAU dan belanja modal yang merupakan kelanjutan penganggaran dari tahun sebelumnya

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam

pengelolaan keuangan. Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Adiwiyana (2012) menemukan hasil DAU mempengaruhi belanja modal daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah H1: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Nugraeni, 2011). Salah satu potensi ekonomi adalah jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Devita et.al, 2014).

Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan membutuhkan belanja modal yang besar pula (Budi, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah

H2: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.2.3 Pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Bappenas, 2011).

Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan

beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Bappenas, 2011).

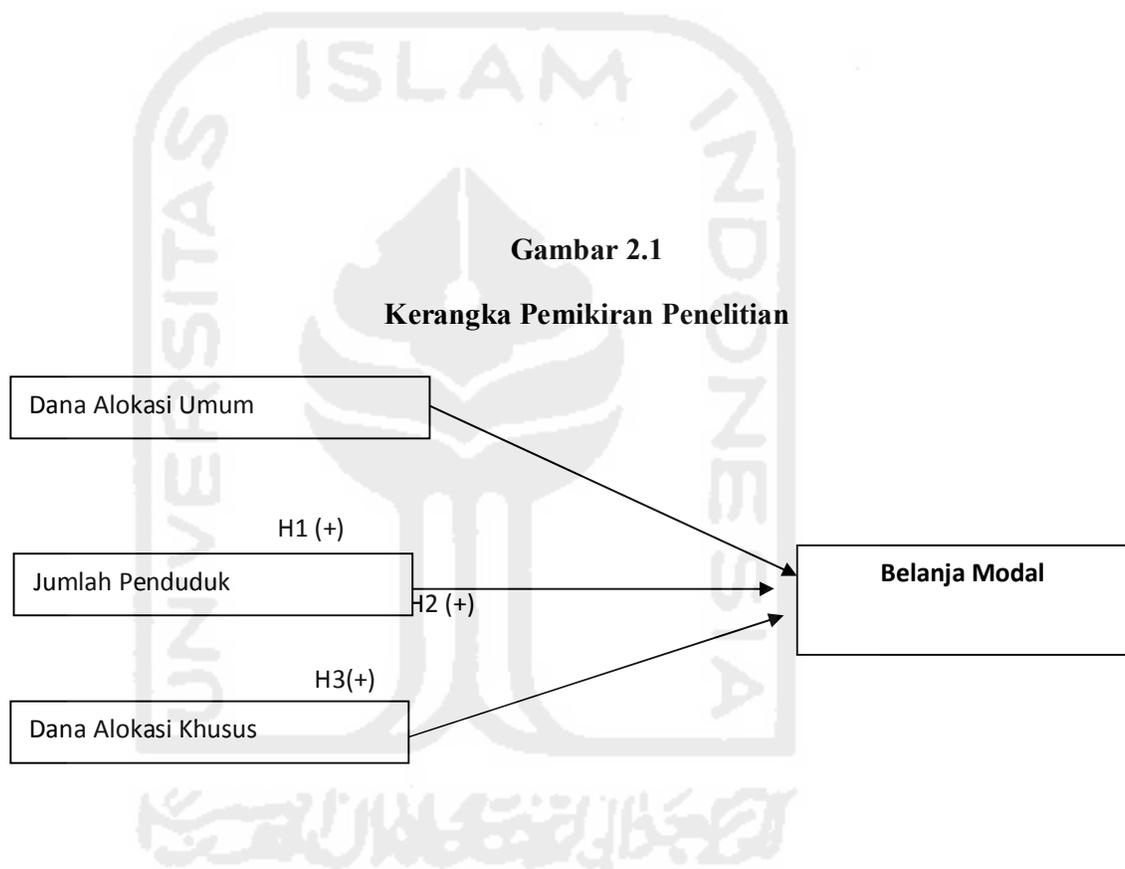
Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Permatasari dan Midalwati, 2016).

Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Wandira (2013) menemukan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Bab III akan membahas mengenai metode penelitian yang merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Bab ini terdiri dari populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional variabel penelitian, dan analisis data.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Kabupaten/kota di DIY Jateng. Pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dimana umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2010).

Sampel adalah bagian dari penelitian yang dilakukan dengan mengambil populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2010). Sampel penelitian ini adalah Kabupaten Kota di DIY Jateng dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota di DIY Jateng yang mempublikasikan laporan APBD dalam situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik 2013-2015.
2. Kabupaten/kota di DIY Jateng yang mempublikasikan laporan APBD-nya selama periode tahun 2013-2015.

Kriteria diatas digunakan dalam penelitian ini karena tidak semua pemerintah daerah menyediakan secara menyeluruh mengenai informasi

keuangan yang dibutuhkan. Dengan kriteria penentuan sampel yang telah ditetapkan, maka sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 40 kabupaten/kota dengan periode amatan 3 tahun diperoleh jumlah observasi penelitian adalah 120. Adapun populasi, sampel dan jumlah observasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Observasi Penelitian

No	Keterangan	2013	2014	2015
1	Kabupaten/kota di DIY Jateng yang mempublikasikan laporan APBD dalam situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik 2013-2015	40	40	40
2	Kabupaten/kota di DIY Jateng yang tidak mempublikasikan laporan APBD-nya selama periode tahun 2013-2015	(0)	(0)	(0)
3	Observasi	40	40	40
4	Total Observasi	120		

Sumber : Data Diolah, 2016

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan APBD. Data dalam penelitian ini menggunakan data *time series* berupa laporan keuangan kabupaten/kota yang berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan APBD. Data Dana Alokasi Umum, dan

DAK menggunakan data Realisasi Anggaran. Data dan jumlah penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian di atas adalah belanja modal. Variabel ini diukur dari jumlah belanja modal yang ada di Laporan Realisasi APBD per Kota/Kabupaten di Provinsi DIY Jateng.

Pada penelitian ini, belanja modal diukur dengan menggunakan Ln belanja modal. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Jika nilai belanja modal langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log*, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$\text{Belanja Modal} = Ln (\text{belanja modal})$$

2. Variabel Independen

a. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur dari jumlah DAU yang ada di Laporan Realisasi APBD per Kota/Kabupaten di DIY Jateng.

Pada penelitian ini, belanja modal diukur dengan menggunakan Ln DAU. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Jika nilai DAU langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log*, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$DAU = Ln (DAU)$$

b. Jumlah Penduduk

Pada penelitian ini, jumlah penduduk diukur dengan menggunakan Ln jumlah penduduk. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Jika nilai jumlah penduduk langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log*, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$JP = Ln (\text{Jumlah penduduk})$$

c. Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang diukur dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional. Pada penelitian ini, DAK diprosikan dengan menggunakan Ln DAK. Penggunaan *natural log* (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berselisih. Jika nilai

DAK langsung dipakai begitu saja maka nilai variabel akan sangat besar, miliar bahkan triliun. Dengan menggunakan *natural log*, nilai miliar bahkan triliun tersebut disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya.

$$DAK = Ln (DAK)$$

3.4 Analisis Data

3.4.1 Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel utama keuangan yang diungkapkan perusahaan dalam laporan keuangan untuk kurun waktu tahun 2013-2015. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata, maksimal, minimal, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan variabel penelitian.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan regresi yang digunakan dapat digunakan sebagai dasar estimasi yang tidak bias. Terutama untuk data yang banyak, perlu menggunakan uji asumsi klasik untuk lebih meyakinkan kesesuaian antara model persamaan regresi tersebut. Adapun tahapan pengujian asumsi klasik menurut Ghazali (2006) ada empat tahap, yaitu uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi data

yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data menggunakan analisis uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*. Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2006):

- a. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- b. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal

2. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi di mana ada korelasi antara variabel bebas (independen) satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini multikolinieritas terindikasi apabila terdapat hubungan linier antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *Variance Inflation Faktor (VIF)*. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas yang digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi mengandung perbedaan variansi residu dari kasus pengamatan satu ke kasus pengamatan lainnya. Jika variansi residu dari kasus pengamatan satu ke kasus pengamatan lainnya mempunyai nilai tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika mempunyai perbedaan maka

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki homoskedastisitas dan bukannya memiliki heteroskedastisitas.

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan adanya kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan *time series*. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui uji *Durbin Watson*.

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi berganda, dengan alasan bahwa dalam penelitian ini melibatkan beberapa variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Adapun model dari regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{LNBM} = \alpha + \beta_1 \text{LNDAU} + \beta_2 \text{LNJP} + \beta_3 \text{LNLW} + \beta_4 \text{LNDAK} + e$$

Dimana :

BM : Belanja Modal

α : Konstanta

DAU : Dana Alokasi Umum

LW : Luas Wilayah

JP : Jumlah Penduduk

DAK : Dana Alokasi Khusus

β : Koefisien Regresi

e : Error

3.4.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar presentase variasi variabel bebas pada model dapat menerangkan oleh variabel terikat (Ghozali, 2006). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$ berarti variabel independen (DAU, PAD, SILPA, Luas Wilayah dan DAK) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja modal) sedangkan jika nilai

signifikansi $> 0,05$ berarti variabel independen (DAU, PAD, SILPA, Luas Wilayah dan DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III telah dijelaskan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian serta metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis penelitian. Bab IV menjabarkan secara rinci mengenai output pengolahan data yang dilakukan serta pembahasan mengenai output data penelitian berupa analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011). Data akan disajikan dalam bentuk statistik deskriptif sebelum dilakukan pengujian untuk memberikan gambaran umum mengenai data variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1.

Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	n	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Deviation
LN BM	120	23,96	27,62	26,11	26,0975	,47874
LN DAU	120	26,60	27,92	27,47	27,4179	,29830
LN JP	120	11,22	15,12	13,70	13,5887	,66904
LN DAK	120	20,15	25,43	24,81	24,6222	,70872

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1. dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Nilai minimum dan maksimum belanja modal pada kabupaten/kota di Jateng dan DIY adalah sebesar 23,96 dan 27,62. Nilai minimum terjadi pada Kota Salatiga sebesar 23,96 atau Rp. 25.458.694.442,00 sedangkan nilai belanja

modal tertinggi sebesar 27,62 atau Rp.990.118.124.350,- terjadi pada Kota Semarang. Nilai rata-rata belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 26,0975 atau Rp. 215.774.560,887,-. Nilai median dari variabel belanja modal adalah sebesar 26,11 dengan nilai standar deviasi dari variabel belanja modal adalah sebesar 0,47874.

2. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi umum pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 26,60 atau Rp. 358.331.867.000,- dan 27,92 atau 1.332.536.848.000,-. Nilai minimum DAU diperoleh kota Salatiga sedangkan nilai maksimum DAU diperoleh Kabupaten Cilacap. Nilai rata-rata DAU diartikan sebagai tingkat kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah sebesar 27,4179 atau Rp. 808.058.262.563,-. Nilai median dari variabel DAU adalah sebesar 24,8061 dengan nilai standar deviasi dari variabel DAU adalah sebesar 0,29830.
3. Nilai minimum dan maksimum dana alokasi khusus (DAK) pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 20,15 atau Rp. 561.100.000,- dan 25,43 atau Rp. 110.203.960.000,-. Nilai minimum DAK diperoleh kota Yogyakarta dan nilai maksimum diperoleh Kabupaten Cilacap. Nilai rata-rata dana alokasi khusus (DAK) diartikan sebagai dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional adalah sebesar 24,6222 atau Rp. 49.349.822.201,-. Nilai median dari variabel DAK adalah

sebesar 24,8061 dengan nilai standar deviasi dari variabel DAK adalah sebesar 0,70872.

4. Nilai minimum dan maksimum jumlah penduduk pada kabupaten/kota di Provinsi Jateng DIY adalah sebesar 11,22 atau 74309 Jiwa dan 15,12 atau 3691196 Jiwa. Nilai minimum jumlah penduduk diperoleh Kabupaten Batang sedangkan nilai maksimum diperoleh Kota Yogyakarta. Nilai rata-rata jumlah penduduk adalah sebesar 13,5887. Nilai median dari variabel jumlah penduduk adalah sebesar 13,7023 dengan nilai standar deviasi dari variabel jumlah penduduk adalah sebesar 0,66904.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif, maka model tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi data yang normal atau tidak dengan uji yang dipakai adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikan $\alpha=0,05$. Apabila Sign hitung $> \alpha$, maka data terdistribusi normal. Sedangkan, jika sebaliknya maka data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Output Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
n	120
Kolmogorov-Smirnov Z	,636
Asymp. Sig. (2-tailed)	,813

Sumber: Output SPSS Diolah ,2016

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov Smirnov seperti pada tabel 4.2. terlihat bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,813 lebih tinggi daripada $\alpha = 5\%$. Dengan demikian data penelitian dalam model penelitian ini dapat dinyatakan normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan antara variabel prediktor atau independen terhadap variabel prediktor yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). Uji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* >0,10 maka model regresi berganda tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011).

Tabel 4.3.

Output Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
LN DAU	,293	3,408	Tidak ada Multikolinieritas
LN JP	,354	2,824	Tidak ada Multikolinieritas
LN DAK	,728	1,373	Tidak ada Multikolinieritas

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari hasil tabel 4.3., dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian ini.

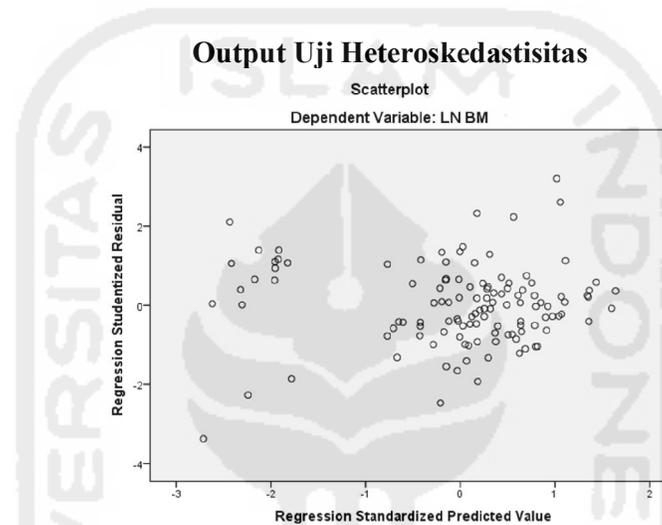
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heterokedastisitas tujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi tersebut terjadi ketidaksamaan varian variabel dari satu pengamatan kepengamatan yang lainnya tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Gejala heterokedastisitas terjadi bila *distrurbance term* untuk setiap observasi tidak lagi konstan, tetapi bervariasi. Perhitungan heterokedastisitas dapat dilakukan dalam banyak model, salah satunya adalah dengan metode Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Apabila terjadi pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, dan apabila tidak ada pola penyebaran maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011)

Hasil Uji Heteroskedastisitas tersebut dapat di ditunjukkan pada Gambar berikut:

Gambar 4.4.



Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari gambar 4.1. diatas dapat diketahui bahwa sebaran data residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 Y dan tidak ada pola tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi linier memiliki korelasi antara kesalahan pada periode t dengan pelanggaran pada periode $t - 1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Tes ini dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*, dimana data tersebut diketahui bahwa dalam jenis masalah *reoccurring* autokorelasi dapat

"mengganggu" antar data (Ghozali, 2011). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5.

Output Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,654 ^a	,427	,413	,38108	1,856

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Dari hasil tabel 4.4. di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,856. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai d_l dan d_u pada tingkat signifikansi 5%, dengan n sebesar 120 dan $k= 3$. Dengan menggunakan standar tersebut dihasilkan nilai d_l sebesar 1,63731 dan d_u sebesar 1,74715. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,856 berada diantara d_u (1,74715) dan $4-d_u$ ($4-1,74715= 2,25285$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi.

4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji regresi linier berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.6.

Output Regresi Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	T hitung	Signifikansi	Kesimpulan
Konstanta	-1,300	3,858	,774	
LND AU	0,834	3,858	0,000	H1 didukung
LNJP	0,003	0,029	0,977	H2 tidak didukung
LND AK	0,182	2,874	0,005	H3 didukung
Fhitung		28,863	0,000 ^b	
Adjusted R Square		0,413		

Variabel Dependen : LNBM

Sumber : Output SPSS diolah, 2016

Keterangan

BM : Belanja Modal

DAU : Dana Alokasi Umum

JP : Jumlah Penduduk

DAK : Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, dapat diperoleh model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{LNBM} = -1,300 + 0,884\text{LNDAU} + 0,003\text{LNJP} + 0,182\text{LND AK}$$

Dari hasil model persamaan regresi di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Nilai *intercept konstanta* sebesar -1,300. Hasil ini dapat diartikan, apabila besarnya nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka besarnya belanja modal adalah -1,300.
2. Koefisien regresi LNDAU= 0,884. Hasil ini dapat diartikan, apabila dana

alokasi umum mengalami peningkatan 1 persen, maka besarnya modal akan meningkat sebesar 0,884 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

3. Koefisien regresi LNJP= 0,003. Hasil ini dapat diartikan, apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,003, dengan asumsi semua variabel independen konstan.
4. Koefisien regresi LNDK = 0,182. Hasil ini dapat diartikan, apabila dana alokasi khusus mengalami peningkatan 1 persen, maka besarnya modal akan meningkat sebesar 0,182 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka

makin baik kemampuan model tersebut menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011). Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.5

Hasil analisis koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,413. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 41,3% dan sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

4.3.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha=5\%$).

1. Pengujian Hipotesis pertama

Pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel DAU. Hipotesis H_1 penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi DAU yaitu 0,834 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal sehingga H_1 penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel jumlah penduduk. Hipotesis H₂ penelitian ini menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Besarnya koefisien regresi jumlah penduduk yaitu 0,003 dan nilai signifikansi sebesar $0,977 > 0,05$. Hal ini berarti variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sehingga H₂ penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.5. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel dana alokasi khusus. Hipotesis H₃ penelitian ini menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Besarnya koefisien regresi dana alokasi khusus yaitu 0,182 dan nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Dengan demikian H₄ penelitian ini didukung.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAU akan meningkatkan belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka

berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan. Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini kemungkinan disebabkan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Hasil ini sesuai dengan penelitian Adiwiyana (2012) yang menemukan hasil DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012) yang menemukan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.4.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hasil tersebut berarti bahwa besar kecilnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi belanja modal.

Hal ini kemungkinan disebabkan karena sarana prasarana dan infrastruktur pembangunan yang ada selama lima tahun terakhir ini masih layak dan memadai sehingga pemerintah daerah khususnya wilayah DIY dan Jateng tidak mengeluarkan anggaran untuk penambahan sarana prasarana maupun pembangunan sehingga jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Devita et.al (2015) yang meneliti di daerah Jambi dan penelitian Herlina (2013) yang meneliti di daerah Kabupaten Berau, Kalimantan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Budi (2013) di Pulau Jawa dan Widiagma (2013) di daerah Jawa Timur yang membuktikan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

4.4.3 Pengaruh DAK terhadap Belanja modal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAK akan meningkatkan belanja modal.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Bappenas, 2011).

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011).

Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya

menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD. Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Bappenas,2011).

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Permatasari dan Midalwati, 2016).

Hasil ini menjelaskan bahwa Kabupaten Kota yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) untuk memberikan

pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Wandira, 2013).

Hasil ini sesuai penelitian Wandira (2013) yang menemukan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar(2011) DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal.



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Pada bab IV telah dijabarkan mengenai output penelitian pengolahan data beserta pembahasan didalamnya. Bab V menyampaikan berupa kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini berhasil menemukan bahwa:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah adanya pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka DAU yang diperolehnya tinggi, dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka DAU yang diperoleh daerah bersangkutan akan rendah. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Jateng dan D.I. Yogyakarta kuat, sehingga tidak tergantung DAU dari Pemerintah Pusat untuk membiayai alokasi belanja modal daerah. Kabupaten/kota di Provinsi Jateng dan D.I. Yogyakarta sudah mampu mengelola DAU mereka sehingga kemandirian daerah dapat tercapai.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi belanja modal. Implikasi dari

hasil penelitian ini adalah penggunaan belanja modal harus disesuaikan dengan potensi penduduk suatu daerah, agar tidak salah dalam pengalokasian belanja modal. Jumlah penduduk merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan dalam mengelola daerahnya apabila suatu daerah ingin mencapai indeks pembangunan manusia sebagai human capital yang pada akhirnya akan ikut berdampak pada perekonomian daerah. Penggunaan belanja daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi penduduk yang ada akan berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi DAK akan meningkatkan belanja modal. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah penggunaan DAK secara optimal. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

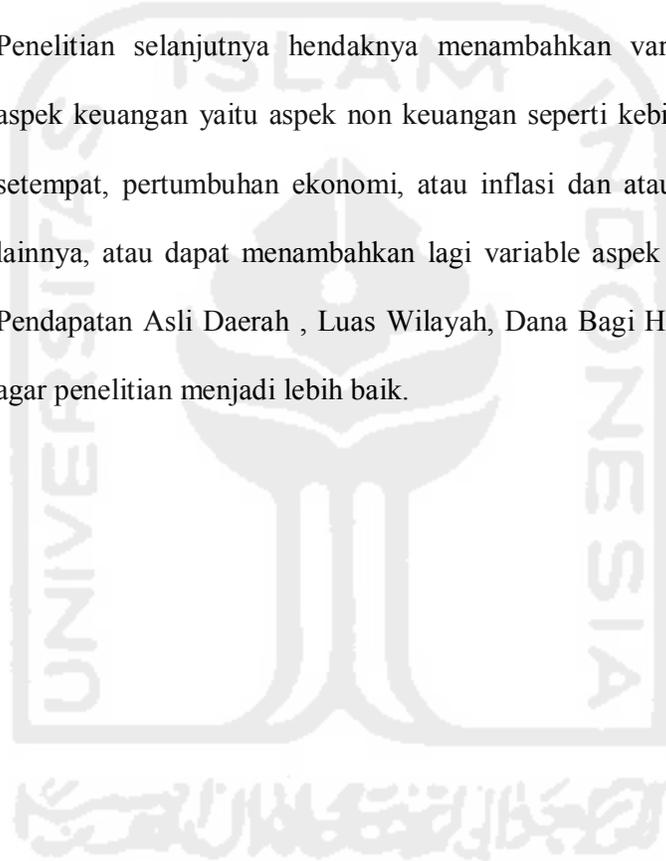
5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel hanya melalui situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tanpa mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan.

5.3 Saran

1. Peneliti berikutnya hendaknya mengambil sampel secara langsung melalui pemerintah daerah dengan mempertimbangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan agar lebih relevan sehingga penelitian menjadi lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel lain diluar aspek keuangan yaitu aspek non keuangan seperti kebijakan pemerintah setempat, pertumbuhan ekonomi, atau inflasi dan atau faktor potensial lainnya, atau dapat menambahkan lagi variable aspek keuangan seperti Pendapatan Asli Daerah , Luas Wilayah, Dana Bagi Hasil dan lain-lain, agar penelitian menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwiyan, P. (2011). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *Skripsi* : Univesitas Diponegoro
- Ardhani, P. (2011). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ardhini. (2011). "Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bactiar, A. (2012). "Pemetaan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Menggunakan Tipologi Klassen Di Surabaya Dan Sekitarnya". e-prints UPN Jatim
- Bappenas. (2011). Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK). White Paper
- Bastian, I. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*, Yogyakarta : BPFE
- Budi, B.S. (2013). Analisis Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Belanja Modal (Studi LKPD Se-Pulau Jawa Tahun 2011-2012). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Devita, Andri, A. Delis & Junaidi. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1) : 63-70
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Deskripsi dan Analisis apbd 2011*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Deskripsi dan Analisis apbd 2015*. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Fatmawati, S. & A. Riduwan. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 2(7) : 1-12
- Fawzyny, W. (2013). "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011". *Skripsi* : UIN Syarif Hidayatullah

- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, S. (2009). "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1) : 103-124
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah (edisi ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat
- Harianto, D. & Hadi, A.P. (2007). "Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita". Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kusnandar & D. Siswantoro. (2012). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi 15
- Mardiasmo. (2005). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi: Yogyakarta
- Mawarni, Darwanis, S. Abdullah. (2013). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh)". *Jurnal Akuntansi Universitas Syah Kuala* 2(2) : 80-90
- Maryadi. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012*. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Merianto, Edy, Betri, & Wenny, C.D. (2015). "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatra Selatan". *Jurnal STIE Multi Data Palembang*. 2(1) : 1-13
- Nordiawan, I. & Maulidah. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta
- Pemendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.

- Permatasari, I. & T. Mildawati. (2016). “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(1) : 1-15
- Pratiwi, N. (2007). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi* : Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.
- Setiyani, R. D. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Studi Empiris Pada Kabupaten Di Karesidenan Pati Periode 2009-2013 . Naskah Publikasi
- Sholikhah, I. & A. Wahyudin. (2014). Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa. *Accounting Analysis Journal*. 3(4) : 53-62
- Sianipar, E. S. (2011). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara”. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara
- Solikin, I. (2010). Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Sriyana, J. (2011). “Disparitas Fiskal Antardaerah Di Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1) : 56-66.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : ALFABETA
- Suhendar, I. M., N.L.G. Sulindawati & I.M. Adiputra. (2015). “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Kota Di Bali Periode 2009-2013”. *Jurusan Akuntansi Program SI 3(1)* : 1-13
- Tuasikal, A. (2008). “Pengaruh DAU, DAK, PAD dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Indonesia”. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* 2(1) : 142-155
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan. Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Wandira, A.G. (2013). “Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Accounting Analysis Journal*, 2(1) : 1-20

Widiagma, A.P. (2015). “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Jawa Timur”. Universitas Jember



LAMPIRAN 1
DAFTAR SAMPEL PENELITIAN

No	Kabupaten Kota
1	Kab. Banjarnegara
2	Kab. Banyumas
3	Kab. Batang
4	Kab. Blora
5	Kab. Boyolali
6	Kab. Brebes
7	Kab. Cilacap
8	Kab. Demak
9	Kab. Grobogan
10	Kab. Jepara
11	Kab. Karanganyar
12	Kab. Kebumen
13	Kab. Kendal
14	Kab. Klaten
15	Kab. Kudus
16	Kab. Magelang
17	Kab. Pati
18	Kab. Pekalongan
19	Kab. Pemasang
20	Kab. Purbalingga
21	Kab. Purworejo
22	Kab. Rembang
23	Kab. Semarang
24	Kab. Sragen
25	Kab. Sukoharjo
26	Kab. Tegal
27	Kab. Temanggung
28	Kab. Wonogiri
29	Kab. Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

36	Kab. Bantul
37	Kab. Gunung Kidul
38	Kab. Kulon Progo
39	Kab. Sleman
40	Kota Yogyakarta



LAMPIRAN 2
DATA PENELITIAN

2015	DAU	DAK	Belanja Modal	Jumlah penduduk
Kab. Banjarnegara	862.810.552.000	63.731.180.000	278.333.398.100	901826
Kab. Banyumas	1.277.833.798.000	70.547.140.000	380.986.849.220	1635909
Kab. Batang	706.782.246.000	66.432.450.000	228.388.801.437	74309
Kab. Blora	848.823.612.000	76.481.560.000	267.984.607.200	852108
Kab. Boyolali	968.089.632.000	68.322.720.000	280.013.885.000	96369
Kab. Brebes	1.234.338.079.000	81.080.820.000	356.274.138.000	1781379
Kab. Cilacap	1.332.536.848.000	88.433.700.000	346.452.746.818	1694726
Kab. Demak	833.041.455.000	76.863.630.000	382.085.254.000	1117905
Kab. Grobogan	1.008.901.500.000	76.099.450.000	272.012.467.248	1351429
Kab. Jepara	935.771.120.000	74.258.610.000	186.171.964.000	1188289
Kab. Karanganyar	906.446.527.000	57.993.170.000	183.435.472.689	856198
Kab. Kebumen	1.146.008.708.000	69.011.970.000	276.330.360.000	1184882
Kab. Kendal	884.901.572.000	61.900.420.000	244.083.900.633	942283
Kab. Klaten	1.164.196.398.000	54.263.970.000	262.171.829.097	1158795

Kab. Kudus	784.919.177.000	61.066.830.000	375.069.995.000	831303
Kab. Magelang	996.070.014.000	42.235.230.000	272.701.298.597	1245496
Kab. Pati	1.086.645.667.000	54.130.720.000	185.463.899.000	1232889
Kab. Pekalongan	862.011.706.000	66.825.230.000	227.713.108.460	873986
Kab. Pemalang	1.058.982.530.000	76.455.810.000	283.606.209.314	1288577
Kab. Purbalingga	805.222.229.000	60.524.110.000	148.475.886.000	898376
Kab. Purworejo	875.528.049.000	69.007.890.000	169.301.395.162	710386
Kab. Rembang	723.091.447.000	68.626.640.000	175.191.157.611	619173
Kab. Semarang	876.672.925.000	24.019.480.000	78.394.389.559	1000887
Kab. Sragen	977.443.589.000	72.521.700.000	174.926.142.000	879027
Kab. Sukoharjo	854.457.636.000	53.871.130.000	240.338.997.000	864207
Kab. Tegal	1.085.549.293.000	50.305.370.000	335.924.044.000	1424891
Kab. Temanggung	731.733.741.000	61.389.760.000	305.690.716.400	745825
Kab. Wonogiri	1.031.393.472.000	83.152.970.000	253.534.950.718	949017
Kab. Wonosobo	748.447.761.000	70.676.100.000	270.968.478.282	777122
Kota Magelang	418.257.922.000	32.216.980.000	141.523.194.000	120792
Kota Pekalongan	421.276.527.000	39.335.050.000	174.509.294.000	296404

Kota Salatiga	400.176.755.000	42.475.400.000	190.395.933.705	183815
Kota Semarang	1.126.847.634.000	24.904.430.000	990.118.124.350	1701114
Kota Surakarta	713.300.856.000	3.750.100.000	170.840.305.000	512226
Kota Tegal	405.831.088.000	39.221.090.000	174.613.601.000	246119
Kab. Bantul	942.850.827.000	61.102.870.000	293.496.091.675	981164
Kab. Gunung Kidul	872.566.961.000	72.771.380.000	197.764.906.522	713579
Kab. Kulon Progo	657.260.489.000	53.805.650.000	221.474.528.185	412049
Kab. Sleman	984.410.612.000	14.433.000.000	325.805.311.899	1172965
Kota Yogyakarta	622.365.351.000	561.100.000	249.101.306.335	3691196

Data LN

2015	DAU	DAK	Belanja Modal	Jumah penduduk
Kab. Banjarnegara	27,48346098	24,87793976	26,35208551	13,71217688
Kab. Banyumas	27,87618741	24,97954698	26,66603069	14,30770917
Kab. Batang	27,28398846	24,91945148	26,15431528	11,21598735
Kab. Blora	27,46711724	25,0603155	26,31419538	13,65546856
Kab. Boyolali	27,59859051	24,9475082	26,35810503	11,47593985
Kab. Brebes	27,84155597	25,11871227	26,59896632	14,39289834
Kab. Cilacap	27,91810565	25,20551896	26,57101227	14,34303163
Kab. Demak	27,44834924	25,06529865	26,6689096	13,92696696
Kab. Grobogan	27,63988323	25,05530687	26,32911374	14,11667311
Kab. Jepara	27,56463675	25,03081957	25,94993662	13,98802502
Kab. Karanganyar	27,53279788	24,78359108	25,9351288	13,66025694
Kab. Kebumen	27,76730633	24,9575458	26,34486294	13,98515375
Kab. Kendal	27,50874226	24,8487928	26,22077786	13,75606093
Kab. Klaten	27,78305218	24,71712631	26,29226596	13,96289123
Kab. Kudus	27,38884659	24,83523468	26,6503785	13,63074963

Kab. Magelang	27,62708339	24,46652054	26,33164289	14,0350444
Kab. Pati	27,7141167	24,7146677	25,94612609	14,02487075
Kab. Pekalongan	27,48253469	24,92534654	26,15135238	13,68081964
Kab. Pemalang	27,68832969	25,05997876	26,37085253	14,06904907
Kab. Purbalingga	27,41438414	24,82630763	25,7236884	13,70834397
Kab. Purworejo	27,49809303	24,95748668	25,85494637	13,47356376
Kab. Rembang	27,30680153	24,95194663	25,88914354	13,33614
Kab. Semarang	27,49939981	23,902131	25,0850182	13,81639716
Kab. Sragen	27,60820642	25,00715166	25,88762968	13,68657089
Kab. Sukoharjo	27,47373276	24,70986055	26,20531625	13,6695676
Kab. Tegal	27,71310724	24,64137767	26,54015091	14,16960588
Kab. Temanggung	27,31868254	24,84050888	26,4458397	13,52224627
Kab. Wonogiri	27,66193189	25,14394776	26,25876752	13,76318199
Kab. Wonosobo	27,34126725	24,9813733	26,32526833	13,56335263
Kota Magelang	26,75936412	24,19575948	25,67572946	11,70182534
Kota Pekalongan	26,76655529	24,39538182	25,88524384	12,59947867
Kota Salatiga	26,71517217	24,47219092	25,9723716	12,1216851
Kota Semarang	27,75044515	23,93831154	27,62109009	14,34679389
Kota Surakarta	27,29316913	22,04504834	25,86399507	13,14652121
Kota Tegal	26,72920287	24,39248045	25,88584138	12,41357044
Kab. Bantul	27,57217392	24,83582467	26,40513016	13,7964949
Kab. Gunung Kidul	27,49470523	25,01058858	26,01034482	13,47804843
Kab. Kulon Progo	27,21134626	24,70864432	26,12357342	12,92889755
Kab. Sleman	27,61530894	23,39278309	26,50956584	13,97504529
Kota Yogyakarta	27,15679314	20,1454097	26,2411255	15,12146108

2014	DAU	DAK	Belanja Modal	Jumlah Penduduk
Kab. Banjarnegara	826.044.419.000	61.066.040.000	206.494.161.626	895986
Kab. Banyumas	1.224.710.992.000	82.519.140.000	360.164.898.641	1620918
Kab. Batang	682.182.894.000	52.176.600.000	157.304.196.255	736397
Kab. Blora	823.874.089.000	61.140.660.000	335.136.756.246	848369
Kab. Boyolali	943.220.456.000	81.095.720.000	303.852.817.878	957857
Kab. Brebes	1.186.969.845.000	97.975.310.000	282.972.400.128	1773379
Kab. Cilacap	1.291.121.704.000	110.203.960.000	414.435.433.036	1685573
Kab. Demak	795.874.748.000	74.599.670.000	540.353.998.879	1106328

Kab. Grobogan	977.675.512.000	85.838.690.000	300.522.182.667	1343960
Kab. Jepara	887.768.694.000	81.294.110.000	188.924.407.454	1170797
Kab. Karanganyar	870.001.752.000	57.238.710.000	223.287.900.900	848255
Kab. Kebumen	1.125.568.884.000	80.709.170.000	465.778.357.808	1181006
Kab. Kendal	852.170.849.000	47.886.615.000	261.586.075.722	934643
Kab. Klaten	1.142.586.588.000	66.576.420.000	268.557.035.809	1154040
Kab. Kudus	795.851.851.000	41.391.675.000	256.850.820.705	821136
Kab. Magelang	965.124.427.000	48.736.118.000	319.022.187.365	1233695
Kab. Pati	1.043.498.355.000	79.852.630.000	224.653.195.934	1225594
Kab. Pekalongan	831.579.000.000	60.380.950.000	187.872.466.874	867573
Kab. Pemalang	1.016.813.333.000	54.018.555.000	164.388.705.445	1284236
Kab. Purbalingga	777.989.499.000	57.267.330.000	112.249.667.286	889214
Kab. Purworejo	854.737.495.000	57.024.620.000	216.762.938.712	708038
Kab. Rembang	700.774.721.000	46.206.000.000	151.454.913.762	614087
Kab. Semarang	848.736.010.000	67.407.340.000	272.265.415.043	987557
Kab. Sragen	946.826.641.000	76.469.300.000	267.219.055.054	875600
Kab. Sukoharjo	826.891.481.000	56.904.480.000	197.957.953.910	856937
Kab. Tegal	1.044.211.310.000	63.646.823.000	226.087.648.919	1420132
Kab. Temanggung	708.764.753.000	56.702.810.000	198.451.766.079	738915
Kab. Wonogiri	1.001.378.439.000	59.392.120.000	223.887.556.535	945817
Kab. Wonosobo	724.245.009.000	59.423.010.000	206.098.010.151	773280
Kota Magelang	417.211.449.000	22.365.783.000	133.263.104.000	120373
Kota				293704

Pekalongan	412.871.094.000	34.173.710.000	159.183.156.133	
Kota Salatiga	399.083.343.000	24.042.788.000	44.245.952.708	181193
Kota Semarang	1.104.739.473.000	29.236.965.000	800.181.230.907	1672999
Kota Surakarta	710.803.934.000	43.848.110.000	286.491.756.994	510077
Kota Tegal	390.732.536.000	22.933.763.000	115.598.831.594	244998
Kab. Bantul	949.252.188.000	60.914.370.000	310.415.290.766	968632
Kab. Gunung Kidul	847.388.294.000	46.172.145.000	127.289.721.491	698825
Kab. Kulon Progo	639.409.211.000	47.077.300.000	146.576.953.515	405222
Kab. Sleman	952.102.502.000	36.504.908.000	282.862.049.259	1163970
Kota Yogyakarta	618.742.352.000	2.249.900.000	193.078.279.594	400467

2014	DAU	DAK	Belanja Modal	Jumah Penduduk
Kab. Banjarnegara	27,43991439	24,83522174	26,05353798	13,70568007
Kab. Banyumas	27,83372601	25,1362961	26,60982782	14,29850321
Kab. Batang	27,24856363	24,67789996	25,78144732	13,50952465
Kab. Blora	27,43728355	24,83644295	26,53780451	13,65107096
Kab. Boyolali	27,57256587	25,11889602	26,43980927	13,77245378
Kab. Brebes	27,80242483	25,30798135	26,3686152	14,38839732
Kab. Cilacap	27,88653249	25,42559867	26,75018303	14,33761612
Kab. Demak	27,40270766	25,03540192	27,01549032	13,91655698
Kab. Grobogan	27,60844366	25,17573567	26,42878741	14,11113104
Kab. Jepara	27,51197707	25,1213394	25,96461281	13,97319527
Kab. Karanganyar	27,49176106	24,77049625	26,13172781	13,65093658
Kab. Kebumen	27,7493097	25,11411804	26,86697573	13,98187718
Kab. Kendal	27,47105287	24,59210187	26,29002923	13,74791992
Kab. Klaten	27,76431575	24,9216163	26,31632915	13,95877939
Kab. Kudus	27,40267889	24,44634561	26,27176129	13,61844403
Kab. Magelang	27,59552287	24,60968623	26,48852649	14,02552429
Kab. Pati	27,67359999	25,10344865	26,1378237	14,01893618
Kab. Pekalongan	27,44659214	24,82393949	25,9590292	13,67345494
Kab. Pemalang	27,64769467	24,71259344	25,82549962	14,06567455
Kab.	27,37997886	24,77099614	25,4439914	13,69809321

Purbalingga				
Kab. Purworejo	27,47406024	24,76674894	26,10207014	13,47025304
Kab. Rembang	27,2754523	24,5563755	25,74355382	13,32789189
Kab. Semarang	27,46701403	24,93401975	26,33004322	13,8029895
Kab. Sragen	27,57638185	25,06015519	26,31133459	13,68266464
Kab. Sukoharjo	27,4409393	24,76463991	26,01132049	13,66111968
Kab. Tegal	27,67428299	24,87661525	26,14418859	14,16626038
Kab. Temanggung	27,28678951	24,76108961	26,01381192	13,51293817
Kab. Wonogiri	27,63239861	24,80742739	26,13440978	13,75980438
Kab. Wonosobo	27,30839558	24,80794736	26,05161767	13,55839649
Kota Magelang	26,756859	23,83079808	25,61559124	11,69835053
Kota Pekalongan	26,74640126	24,25472247	25,7933213	12,59032774
Kota Salatiga	26,71243611	23,90310091	24,51302974	12,10731804
Kota Semarang	27,73063065	24,09869967	27,40810408	14,33012838
Kota Surakarta	27,28966247	24,50399745	26,3809756	13,14231697
Kota Tegal	26,69128911	23,85587603	25,47339169	12,40900533
Kab. Bantul	27,57894034	24,83273494	26,46117689	13,78364005
Kab. Gunung Kidul	27,46542486	24,55564253	25,5697316	13,45715563
Kab. Kulon Progo	27,18381048	24,57505677	25,71081641	12,91219034
Kab. Sleman	27,58193854	24,32071255	26,36822516	13,96734713
Kota Yogyakarta	27,15095479	21,53415161	25,98636154	12,90038665

2013	DAU	DAK	Belanja Modal	Jumah Penduduk
Kab. Banjarnegara	763.426.566.000	69.482.630.000	175.918.010.287	889921
Kab. Banyumas	1.127.939.938.000	78.662.730.000	313.188.975.057	1605579
Kab. Batang	641.663.630.000	49.792.440.000	148.222.973.774	729616
Kab. Blora	753.830.036.000	53.492.890.000	260.455.399.862	844444
Kab. Boyolali	871.685.981.000	59.233.500.000	249.111.725.695	951817
Kab. Brebes	1.098.999.510.000	82.628.900.000	325.840.766.312	1764648
Kab. Cilacap	1.197.315.060.000	108.157.350.000	421.186.662.714	1676089
Kab. Demak	737.911.647.000	76.556.190.000	352.309.888.384	1094472
Kab. Grobogan	906.666.365.000	104.304.440.000	353.074.204.294	1336304

Kab. Jepara	814.380.324.000	67.487.370.000	158.798.848.275	1153213
Kab. Karanganyar	810.216.582.000	55.203.060.000	148.478.744.026	840171
Kab. Kebumen	1.021.871.180.000	79.063.860.000	286.958.914.202	1176722
Kab. Kendal	788.134.078.000	41.931.490.000	155.398.900.968	926812
Kab. Klaten	1.066.318.427.000	61.175.420.000	186.883.543.096	1148994
Kab. Kudus	719.406.935.000	52.208.880.000	132.972.459.152	810810
Kab. Magelang	899.528.369.000	43.096.223.000	108.603.624.493	1221681
Kab. Pati	960.479.326.000	72.903.370.000	203.474.443.723	1218016
Kab. Pekalongan	768.500.117.000	60.587.590.000	184.320.225.104	861082
Kab. Pemalang	931.426.998.000	63.504.568.000	249.976.019.799	1279596
Kab. Purbalingga	719.185.020.000	66.641.060.000	112.767.369.781	879880
Kab. Purworejo	793.904.679.000	53.323.020.000	180.854.184.775	705483
Kab. Rembang	640.273.360.000	42.098.910.000	135.447.797.344	608903
Kab. Semarang	778.604.920.000	59.113.470.000	227.584.378.658	974092
Kab. Sragen	869.155.545.000	61.857.560.000	141.263.725.821	871989
Kab. Sukoharjo	763.462.900.000	53.124.680.000	209.691.364.140	849506
Kab. Tegal	957.576.304.000	72.524.910.000	215.975.068.911	1415009
Kab. Temanggung	651.171.674.000	41.627.621.000	103.805.509.274	731911
Kab. Wonogiri	917.476.557.000	75.705.890.000	192.048.802.286	942377
Kab. Wonosobo	665.548.034.000	57.950.180.000	138.195.097.852	769318
Kota Magelang	385.859.241.000	20.644.487.000	142.588.509.967	119935
Kota Pekalongan	384.489.368.000	34.721.100.000	177.257.508.051	290870
Kota Salatiga				178594

	358.331.867.000	16.958.760.000	25.458.694.443	
Kota Semarang	1.054.002.569.000	14.993.022.000	591.011.412.262	1644800
Kota Surakarta	659.647.382.000	32.893.036.000	244.975.523.723	507825
Kota Tegal	370.642.983.000	30.039.185.000	100.804.466.696	243860
Kab. Bantul	854.810.634.000	47.196.880.000	183.269.840.475	955015
Kab. Gunung Kidul	779.069.238.000	59.793.058.000	156.373.178.937	693523
Kab. Kulon Progo	594.978.790.000	52.894.140.000	123.313.526.117	401450
Kab. Sleman	891.589.912.000	50.823.330.000	206.859.865.136	1147037
Kota Yogyakarta	597.212.209.000	6.220.630.000	167.079.742.204	397828

2013	DAU	K	DA	Be lanja Modal	Jumah Penduduk
Kab. Banjarnegara	27,36108278	24,96434263	25,89328387	13,69888797	
Kab. Banyumas	27,75141402	25,08843531	26,4700726	14,288995	
Kab. Batang	27,18733006	24,631129	25,72198356	13,50027365	
Kab. Blora	27,34843276	24,70281458	26,28569747	13,6464337	
Kab. Boyolali	27,49369508	24,8047531	26,24116733	13,76612807	
Kab. Brebes	27,72542135	25,13762534	26,50967465	14,3834618	
Kab. Cilacap	27,81110272	25,40685295	26,76634195	14,33197366	
Kab. Demak	27,32708993	25,06129082	26,58777699	13,90578261	
Kab. Grobogan	27,53304037	25,37057977	26,58994408	14,10541815	
Kab. Jepara	27,42569332	24,93520631	25,79090413	13,95806252	
Kab. Karanganyar	27,42056743	24,73428422	25,72370765	13,64136072	
Kab. Kebumen	27,65265655	25,09352172	26,38260489	13,97824316	
Kab. Kendal	27,39293406	24,45930293	25,7692612	13,73950602	
Kab. Klaten	27,69523311	24,83701131	25,9537515	13,95439733	
Kab. Kudus	27,30169301	24,67851843	25,61340787	13,60578903	
Kab. Magelang	27,52513643	24,4867012	25,41097062	14,01573834	
Kab. Pati	27,59069829	25,0124007	26,03880625	14,01273386	
Kab. Pekalongan	27,36770655	24,82735592	25,93994044	13,66594502	
Kab. Pemalang	27,55998365	24,87437768	26,24463083	14,06205496	
Kab. Purbalingga	27,30138449	24,92258674	25,44859286	13,68754081	
Kab. Purworejo	27,40022924	24,69963397	25,92095693	13,46663795	
Kab. Rembang	27,18516105	24,46328769	25,63185214	13,31941426	

Kab. Semarang	27,38076959	24,80272465	26,1507869	13,78926103
Kab. Sragen	27,49078794	24,84810016	25,67389438	13,67853209
Kab. Sukoharjo	27,36113037	24,69590744	26,06890259	13,65241028
Kab. Tegal	27,58767125	25,00719593	26,09842882	14,16264645
Kab. Temanggung	27,20203915	24,45202975	25,36578488	13,5034142
Kab. Wonogiri	27,54489287	25,0501218	25,98101536	13,75616069
Kab. Wonosobo	27,22387665	24,78284951	25,65193228	13,55325969
Kota Magelang	26,67873848	23,75071415	25,68322877	11,69470521
Kota Pekalongan	26,67518197	24,27061341	25,90086936	12,58063171
Kota Salatiga	26,6047254	23,55405035	23,96032315	12,09287035
Kota Semarang	27,683616	23,43085073	27,10510116	14,31312935
Kota Surakarta	27,21497126	24,2165268	26,22442414	13,13789218
Kota Tegal	26,63850513	24,12576853	25,3364485	12,40434957
Kab. Bantul	27,4741458	24,57759363	25,93422544	13,76948233
Kab. Gunung Kidul	27,38136576	24,8141554	25,77551116	13,44953968
Kab. Kulon Progo	27,11179159	24,69155839	25,53799594	12,90283827
Kab. Sleman	27,51627212	24,65162134	26,05530742	13,95269265
Kota Yogyakarta	27,11553835	22,55113702	25,84173703	12,89377503



LAMPIRAN 3
HASIL OLAH DATA

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LN DAK, LN JP, LN DAU ^b		Enter

- a. Dependent Variable: LN BM
b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,654 ^a	,427	,413	,38108	1,856

- a. Predictors: (Constant), LN DAK, LN JP, LN DAU
b. Dependent Variable: LN BM

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,574	3	4,191	28,863	,000 ^b
	Residual	16,846	116	,145		
	Total	29,420	119			

- a. Dependent Variable: LN BM
b. Predictors: (Constant), LN DAK, LN JP, LN DAU

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,300	4,516		-,288	,774		
	LN DAU	,834	,216	,500	3,858	,000	,293	3,408
	LN JP	,003	,088	,003	,029	,977	,354	2,824
	LN DAK	,182	,063	,237	2,874	,005	,728	1,373

- a. Dependent Variable: LN BM

